

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pertumbuhan penduduk di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya, dan peningkatan jumlah tersebut menimbulkan berbagai permasalahan. Salah satu permasalahan yang diakibatkan oleh bertambahnya jumlah penduduk adalah sampah. Meningkatnya aktivitas konsumsi masyarakat menyebabkan peningkatan timbulan sampah atau limbah, seperti residu yang dihasilkan dari aktivitas sehari-hari masyarakat atau proses alam. Meningkatnya sampah akan menjadi permasalahan lingkungan hidup, permasalahan ini masih terus dibicarakan oleh semua pihak karena memerlukan banyak pihak untuk menyikapi dan menanganinya. Kebutuhan akan permukiman yang bersih dan sehat, bersama dengan upaya untuk mencapai target SDGs, memerlukan pelayanan persampahan tetap. menjadikan layanan kebijakan dan perencanaan sebagai acuan yang jelas lebih sulit bagi pelaksana lapangan

Sampah atau limbah selalu dihasilkan oleh tindakan manusia. Kota semakin besar, dan beban yang harus mereka tanggung juga meningkat. Salah satunya adalah tanggung jawab atas sampah yang dibuat oleh masyarakat perkotaan secara kolektif. Sampah dapat menimbulkan berbagai efek negatif yang sangat besar jika tidak ditangani dengan hati-hati dan hati-hati, seperti mengubah keseimbangan lingkungan secara merugikan atau tidak disengaja, mencemari tanah, air, dan udara. Semua

pihak, termasuk masyarakat dan pemerintah, harus berpartisipasi dalam pengelolaan sampah yang efisien dan efektif. Menurut Gunawan (2007), semua pihak bertanggung jawab untuk membuang sampah tersebut agar tidak menimbulkan masalah lagi.

Pengelolaan infrastruktur lingkungan adalah salah satu masalah yang dihadapi oleh kota-kota berkembang. Air bersih dan limbah merupakan masalah yang terkait dengan pengelolaan infrastruktur lingkungan. Dibutuhkan sistem pengelolaan sampah lingkungan untuk mengurangi volume sampah dan memanfaatkannya sebelum dibuang.

Sebagian besar pengelolaan sampah di Indonesia dilakukan tanpa menggunakan teknologi dan metode pengelolaan sampah yang ramah lingkungan, yang berdampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan. Selain itu, sistem pengelolaan sampah yang masih bergantung pada pemerintah menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya lingkungan yang bersih. Sampah adalah masalah yang sangat penting. Sebenarnya, sampah dapat dianggap sebagai masalah budaya karena memengaruhi semua aspek kehidupan (Sudradjat, 2006). Agar biaya pengelolaan sampah dapat diminimalkan, pengelolaan sampah harus dilakukan dengan cara yang benar dan melibatkan semua pihak—pemerintah, swasta, dan masyarakat.

Sampah dan pengelolaannya kini menjadi isu yang semakin mendesak di perkotaan di Indonesia. Seiring bertambahnya jumlah penduduk dan aktivitas penduduk perkotaan, jenis dan komposisi sampah

menjadi semakin kompleks, serta permasalahan pengolahan dan pengendalian sampah perkotaan menjadi semakin kompleks. Masyarakat enggan berurusan dengan sampah, padahal memang benar sampah dihasilkan setiap hari. Mereka ingin aktivitas sehari-harinya tidak menghasilkan sampah, tetapi hal ini tidak dapat dihindari karena sampah sendiri memiliki efek negatif yang signifikan (Karadimas, 2007). Pemerintah dan masyarakat bertanggung jawab untuk mengelola sampah. Dalam hal sampah permukiman, ada dua pihak yang bertanggung jawab untuk mengelola sampah: masyarakat bertanggung jawab untuk mengelola sampah dari sumber ke TPA, dan pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mengelola sampah dari TPS ke TPA. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 33 tahun 2010 menjelaskan hal ini. Perawatan dan pemilahan sampah di sumber, pengolahan sampah skala masyarakat di sumber, dan pengumpulan sampah dari sumber ke TPS adalah semua tanggung jawab masyarakat. Sementara itu, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mengelola sampah permukiman, yang dalam kasus ini diberikan kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Rembang.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Lingkungan Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional mengenai :

1. Ruang wilayah Nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan
2. Keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan
3. Keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota
4. Keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota dalam rangka perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negative terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.
5. Pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang dipengaruhi oleh Perda Nomor 14 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Rembang Tahun 2011–2031. Memadukan penggunaan sumber daya alam dan buatan, melindungi fungsi ruang, dan mencegah dampak negatif lingkungan merupakan tantangan bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang. Selain itu, seperti yang dinyatakan dalam Bab II Pasal 4, tujuan penataan ruang wilayah Rembang adalah untuk menjadi kawasan pantai unggulan yang akan mendukung pertumbuhan sektor kelautan dan perikanan, pertanian, pertambangan, dan industri, serta keterpaduan pembangunan wilayah utara dan selatan dengan mempertimbangkan aspek lingkungan.

Menurut Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2021 Kabupaten Rembang, Dinas Lingkungan Hidup bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan, peraturan, dan standar pelaksanaan pelayanan persampahan. UPT Pengelolaan Sampah, sebagai operator penyedia jasa, menjalankan fungsinya sebagai pelaksana pengelolaan sampah. Hal ini disebabkan oleh layanan yang aktif yang diberikan kepada masyarakat dan pihak-pihak yang dilayani oleh pemerintah.

Data menunjukkan bahwa UPT Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang, yang memiliki 14 kecamatan, 294 desa, dan 633.429 warga, belum memenuhi target kinerja. Salah satu masalahnya adalah sampah dari empat kecamatan (Sumber, Bulu, Gunem, dan Sale) tidak diangkut ke TPA dan dibuang di pekarangan mereka sendiri. Selain itu, sampah dari sepuluh kecamatan juga tidak diangkut ke TPA dan dibuang di pekarangan mereka sendiri. Akibatnya, sistem pengangkutan sampah yang digunakan oleh mobil pengangkut sampah harus diperbaiki. Ada 2,466 km jarak pulang pergi di seluruh wilayah Kabupaten, dan TPA Landoh Kabupaten Rembang menerima 135,8 m³ sampah per hari. Sampah ini sebagian besar berasal dari Kecamatan Rembang, dengan pasar dan pelabuhan sebagai tempat penyumbang sampah terbesar. Jumlah sampah yang ditampung oleh TPA Landoh setiap hari terus meningkat. Ironisnya, lebih banyak lahan untuk mengelola sampah tidak diikuti dengan lebih banyak sampah. Kabupaten Rembang masih menggunakan sistem Open Dumping meskipun ada banyak sistem pengelolaan sampah lainnya. Kota-

kota besar Indonesia sebenarnya telah meninggalkan sistem ini dalam jumlah besar. Hal ini disebabkan oleh banyak kelemahan dan kerugian sistem ini, terutama terkait dengan peningkatan luas lahan dan tingkat pencemaran air sampah yang meresap ke dalam tanah. Hasilnya, sumber air tercemar dapat menyebabkan masalah kesehatan bagi masyarakat sekitar. Di Rembang, sebagian besar sampah dibuang ke saluran air dan sungai karena pengelolaan yang tidak merata. (dikutip dari : <https://kalasela.id/pengelolaan-sampah-di-rembang-masalah-dan-solusi/>)



Gambar 1.1. Kondisi Sampah Berserakan

Sumber : lokasi Kelurahan tanjungsari kabupaten rembang

Ini menunjukkan bahwa orang tidak tahu cara mengelola sampah rumah tangga sendiri. Sebenarnya jelas bahwa sistem pengelolaan sampah di Rembang tidak ideal. Jika Anda pergi ke pasar tradisional, Anda akan melihat tumpukan sampah dan bau menyengat dari tong sampah di setiap sudut.. (dikutip dari : <https://kalasela.id/pengelolaan-sampah-di-rembang-masalah-dan-solusi/>)

Keberhasilan penanganan sampah bergantung pada kesadaran masyarakat. Masyarakat harus belajar dan menyadari bagaimana menangani sampah sejak

awal, karena pemahaman yang salah akan menyebabkan masalah yang lebih sulit dikemudian hari. (dikutip dari : dokumen dari Perencanaan Teknis Manajemen Persampahan (PTMP) Kabupaten Rembang)

Tabel 1.1. Data Timbulan Sampah

Tahun	Kabupaten/Kota	Timbulan sampah harian (Ton)	Timbulan sampah Tahunan (Ton)	Kenaikan Timbulan Sampah (%)
2022	Rembang	252,13	92.026,00	2,63
2021	Rembang	245,66	89.666,36	3,17
2020	Rembang	238,10	86.905,62	4,02
2019	Rembang	228,89	83.544,12	

Sumber : Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN)

Data timbulan di atas merupakan perhitungan dari timbulan sampah harian dan Tahunan. Dari tahun 2019 terhitung timbulan sampah mencapai 83.544,12 ton per Tahun sedangkan tahun 2022 terhitung mencapai 92.026,00 ton Per tahun yang dikarenakan juga meningkatnya jumlah penduduk kabupaten Rembang. Sampah meningkat seiring dengan peningkatan populasi karena kurangnya ruang atau tempat untuk menampung sampah dan peningkatan aktivitas penduduk. seperti dalam hal pembangunan, perdagangan, industri, dll.

Tabel 1.2. Neraca Pengelolaan Sampah Tahun 2021-2022 Kabupaten

Rembang

Keterangan	Tahun 2021	Tahun 2022	PERUBAHAN	
	(Jan-Des)	(Jan-Des)	Tahun 2021-Tahun 2020	
I Timbulan Sampah	89,666,36	92,026.00	2,359,64	3%
II Jumlah Pengurangan Sampah	14,624.54	14.801.36	176,82	1%
<i>Persentase pengurangan sampah</i>	<i>16,31%</i>	<i>16,08%</i>		
a Jumlah Pembatasan Timbulan Sampah	366,37	494,72	128,35	35%
b Jumlah Pemanfaatan Kembali Sampah	42,65	42,65	0,00	0%
c Jumlah Pendaauran Uang Sampah	14,215,53	14,263,99	48,47	0%
III Jumlah Penanganan Sampah	13,292,21	13,937,01	644,81	5%
<i>Persentase Penanganan sampah</i>	<i>14,82%</i>	<i>16,14%</i>		
a Pengolahan	79,21	4,38	-74,83	-94%
Jumlah sampah terolah menjadi bahan baku	79,21	4,38	-74,83	-94%
Jumlah sampah termanfaatkan menjadi sumber energi	0.00	0.00	0.00	
b Pemrosesan Akhir	13,213,00	13,932,53	719,63	5%
Jumlah sampah yang terproses di TPA	13,213,00	13,932,63	719,63	5%

IV	Sampah yang Dikelola (II + III)	27,916,75	28,738,37	821,63	3%
	<i>Persentase sampah terkelola</i>	31,13%	31,23%		
V	Sampah tidak Dikelola (I – IV)	61,749,61	63,267,63	-1,538,01	-2%
	<i>Persentase sampah tidak terkelola</i>	68,87%	68,77%		

Sumber : Dokumen Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang

Beberapa data Neraca Pengelolaan Sampah pada Tahun 2021-2022 di Kabupaten Rembang. Terdapat Persentase Pengurangan sampah tahun 2021 (Januari- Desember) sekitar 16.31%, sedangkan pada tahun 2022 (Januari-Desember) sekitar 16.08%. hal tersebut dikarenakan jumlah pembatasan Timbulan Sampah, Jumlah Pemanfaatan Kembali Sampah dan Jumlah Pendaauran Ulang Sampah meningkat.

Persentase penanganan sampah pada tahun 2021 (Januari– Desember) adalah sekitar 14,82%, dan pada tahun 2022 (Januari– Desember) adalah sekitar 15,14%. Persentase ini mencakup pemilahan/pengumpulan, pengolahan (jumlah sampah yang diolah menjadi pakan ternak, kompos, daur ulang, dan digunakan sebagai sumber energi), dan pemrosesan akhir (jumlah sampah yang diproses menjadi bahan bakar).

Sampah yang terkelola pada Tahun 2021 sekitar 31,13% dan Tahun 2022 sekitar 31,23% dimana terjadi peningkatan dalam pengelolaannya dan sampah yang tidak terkelola pada Tahun 2021 sekitar 68,87% dan Tahun 2022 sekitar 68,77% dimana terdapat penurunan. Kesimpulannya walaupun persentase sampah yang tidak terkelola sudah menurun, namun hal tersebut

masih belum dikatakan baik mengingat persentasenya menurun sedikit yang artinya masih ada kendala-kendala dalam pengelolaannya.

**Tabel 1.3 Daftar TPS dan Jumlah Kontainer Pemukiman Kabupaten
Rembang**

No	Kecamatan	Nama TPS	Jumlah Kontainer
1	Rembang	1. TPS Perumahan Permata Hijau	1
		2. TPS Desa Ngotet	1
		3. TPS Stadion Rembang	2
		4. TPS Bank Pasar Rembang	2
		5. TPS Depo Leteh	1
		6. TPS Krapyak	1
		7. TPS Borotugel Kabongan Kidul	2
		8. TPS Perumahan Korpri Tireman	3
		9. TPS Ngadem	3
		10. TPS Balai Kartini	1
		11. TPS Tasik Agung Rembang	1
		12. TPS Taman Kartini	1
		13. TPS Magersari	1
		14. TPS Makam Krapyak	1
		15. TPS Sumber Mukti	1
		3	
		1	
		1	
		1	
		1	
		1	
2	Lasem	1. TPS Ngeplak	1
		2. TPS Soditan	1
		3. TPS Babagan	1

Sumber : *Dokumen Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang*

Di Kabupaten Rembang terdapat 20 TPS Permukiman dan 22 TPS Non-Permukiman. Dari 42 TPS yang ada terdapat 54 kontainer yang tersebar berdasarkan jumlah sampah di tiap sumber sampah. TPS Permukiman melayani sampah yang berasal dari permukiman warga. TPS Permukiman di Kabupaten Rembang hanya terdapat Kecamatan Rembang

dan Kecamatan Lasem. Sebanyak 17 TPS Permukiman terdapat di Kecamatan Rembang, sedangkan 3 lainnya berada di Kecamatan Lasem.

Selain TPS Permukiman, terdapat TPS Non-Permukiman yang melayani sampah yang berasal dari kegiatan industri, pasar, maupun instansi. Terdapat 22 TPS Non- Permukiman yang ada di Kabupaten Rembang dengan jumlah kontainer sebanyak 30 unit. Kabupaten Rembang didominasi oleh TPS Non-Permukiman yang melayani sampah yang berasal dari pasar.

Tabel 1.4. Daftar TPS dan Jumlah Kontainer Non-Permukiman Kabupaten Rembang

No.	Kecamatan	Nama TPS	Jumlah Kontainer
1	Sarang	1. TPS Pondok Pesantren Al Anwar 3	1
		2. TPS Pasar Sarang (1)	1
2	Pamotan	1. TPS Pasar Pamotan (2)	2
3	Sedan	1. TPS Balai Kartini (1)	1
4	Sulang	1. TPS Pasar Sulang (1)	1
5	Rembang	1. TPS Pasar Rembang (2)	2
		2. TPS Pasar Hewan Rembang (3)	3
		3. TPS Rumah Dinas Bupati Rembang	1
		4. TPS RSUD R. Soetrasno (1)	1
		5. TPS Pasar Pentungan (2)	2
		6. TPS RSI Arafah (1)	

		7. TPS SMA N 1 Rembang (1)	1
		8. TPS Sekwan (DPRD) (1)	1
		9. TPS Taman Kartini (1)	1
			1
6	Kragan	1. TPS Pasar Kragan (2)	2
		2. TPS Pasar Pandangan (1)	1
7	Sluke	1. TPS PLTU Sluke (1)	1
		2. TPS BKL Sluke (1)	1
8	Lasem	1. TPS Pasar Lasem (2)	2
		2. TPS Alun-Alun Lasem (2)	2
		3. TPS Jolotundo (1)	1
		4. TPS Pasar Tulis (1)	1
			1

Sumber : Dokumen Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang

Berdasarkan data di atas, masih banyak sarana prasarana yang belum ada di berbagai wilayah Kabupaten Rembang. Kabupaten Rembang memiliki 14 Kecamatan, namun belum semuanya mendapatkan fasilitas kontainer. Dalam jumlah kontainer di area permukiman, terdapat 2 kecamatan yang telah mendapatkan fasilitas yakni kecamatan Rembang dan Lasem. Sedangkan pada area Non-Permukiman, yang mendapatkan fasilitas yakni Kecamatan Sarang, Sedan, Pamotan, Sulang, Rembang, Kragan, Sluke dan Lasem. Hal itu juga disebabkan karena transportasi yang kurang dalam menjangkau area yang sedikit lebih jauh.

Berdasarkan penggambaran situasi serta kondisi dari permasalahan dan berbagai temuan peneliti yang telah disampaikan sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Strategi**

Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Rembang”.

1.2. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan Latar Belakang tersebut dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Kondisi Sampah masih berceceran terutama di wilayah yang berdekatan dengan laut.
2. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai penanganan sampah di lingkungan
3. Kurangnya kepedulian masyarakat dalam mengatasi permasalahan sampah
4. Belum terdapat fasilitas untuk mengelola sampah

5. TPS atau *Container* sampah diletakkan di tempat yang tidak strategis sehingga menyebabkan bau yang menyengat

1.2.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan pada latar belakang dapat menjelaskan fokus masalah penelitian, maka rumusan permasalahan yang akan diteliti yaitu:

- 1) Bagaimana analisis lingkungan strategi dalam pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang?
- 2) Bagaimana Strategi Pengelolaan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Perumusan Masalah yang timbul diatas, hal tersebut bertujuan untuk:

- 1) Mengidentifikasi lingkungan strategi pengelolaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang
- 2) Merumuskan strategi dalam pengelolaan sampah pada Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Rembang

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini digunakan untuk berkontribusi dalam pengembangan ilmu administrasi publik terkait pemikiran akademis dalam menganalisa Strategi Pengelolaan Sampah di Kabupaten Rembang.

1.4.2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Peneliti

Dengan penelitian ini, peneliti memperoleh ilmu pengetahuan dan dapat diimplementasikan dari aktivitas pembelajaran selama perkuliahan

b. Bagi Instansi Terkait

Penelitian ini dilakukan agar dapat memberikan solusi untuk memperbaiki permasalahan yang ada untuk membangun kepercayaan masyarakat.

c. Bagi Pembaca

Dengan dilakukan penelitian ini, pembaca dapat memperoleh pengetahuan tentang Strategi Pengelolaan Sampah di Kabupaten Rembang

1.5. Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya digunakan sebagai acuan oleh penulis untuk membuat gambaran tentang metode penelitian yang akan dilakukan.

Penelitian terdahulu digunakan sebagai perbandingan antara kenyataan di lapangan dan teori yang akan digunakan. Ada beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini.

Sebuah penelitian yang ditulis oleh Hery Setiaan, Tjahya Supriatna, dan Sampara Lukman pada tahun 2019 menunjukkan bahwa penanganan sampah belum berjalan dengan baik di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Para peneliti menemukan bahwa lahan TPS terbatas sehingga tidak sebanding dengan jumlah timbulan sampah, sosialisasi hanya terbatas pada aparatur, dan koordinasi tugas belum maksimal dengan UPT (Unit Pelaksana Teknis). Kualitas karyawan tetap rendah, dan masyarakat tidak melakukan apa-apa untuk mengurangi volume sampah, memilah, dan memanfaatkannya.

. Penelitian tentang efektivitas pengelolaan sampah di Kota Denpasar (suatu penelitian di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar) ditulis oleh Ni Wayab Eni Winarsih, I Made Wimas Candrsnegara, dan I Putu Eka Mahardika pada tahun 2019. Menurut penelitian ini, ada tiga cara untuk mengurangi sampah: mengurangi timbulan (reduce), menggunakan kembali (reuse), dan mendaur ulang (recycle). Untuk menangani sampah, ada lima cara: pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.

Penelitian yang dilakukan oleh Farhans Aziz Nubarakh, Rina Yulianti, dan Maulana Yusuf pada tahun 2020 membahas implementasi strategi Dinas Lingkungan Hidup dalam menangani sampah di kota Serang. Penelitian

tersebut menemukan bahwa meskipun ada beberapa program yang sudah direncanakan, terdapat beberapa kendala yang harus diatasi, dan proses pengawasan sampah liar belum berjalan dengan baik. Selain itu, anggaran tidak mencukupi untuk menangani masalah sampah di kota Serang.

Penelitian yang dilakukan oleh Daffa Nabila Faisal pada tahun 2020 berjudul Strategi Komunikasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak dalam mengkampanyekan pengurangan dan penanganan sampah. Peneliti menemukan bahwa orang-orang yang berasal dari dalam dan luar lingkup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak harus menjadi komunikator untuk menyampaikan pesan. Reputasi dan kemampuan komunikator menentukan pemilihan komunikator ini. Komunikator menyampaikan pesan yang informatif dan mendidik.

Muhammad Fahrizal Hasibuan (2021) menyelidiki bagaimana Dinas Lingkungan Hidup bertanggung jawab atas pengelolaan sampah di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu. Selain menyediakan sarana dan prasarana berkualitas tinggi, penelitian ini bertujuan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan masyarakat terhadap sampah. Tidak ada fasilitas persampahan, armada pengangkut sampah yang tidak cukup, dan metode pengumpulan sampah yang kurang cepat adalah beberapa tantangan yang dihadapi oleh layanan lingkungan dalam pengelolaan sampah.

Olga Lawinska, Anna Korombel dan Monika Zajemska. (2022) dengan judul penelitian Pyrolysis-Based Municipal Solid Waste Management in Poland. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa penggunaan pirolisis adalah

termokimia proses dimana fraksi cair dan gas diperoleh untuk digunakan langsung di berbagai pembangkit listrik atau untuk produksi bahan kimia yang bernilai tambah. Masih banyak kendala-kendala seperti fasilitas yang kurang maksimal.

Dalam penelitian mereka pada tahun 2022, Nibras Abdullah, Ola A. Al-wesabi, Bidiea Abdulkarem Mohammed, Zeyad Ghaleb Al-Mekhiafi, Meshari Alazmi, Mohammad Alsaffar, Mohammed Anbar, dan Putra Sumati melakukan penelitian yang berjudul Pendekatan Terintegrasi untuk Menciptakan Sistem Pengelolaan Limbah Organik yang Bertahan Lama di Saudi Arabia. Dijelaskan bahwa sistem pengelolaan sampah yang berbasis IOT digunakan untuk mengelola sampah plastik. Banyak rekomendasi telah dibuat untuk mengendalikan sampah organik, termasuk pengomposan dan meningkatkan efisiensi pengelolaan truk sampah.

Saimin Huang, Honghe Wang, Waqas Ahmad, Ayaz ahmad, Nikolai Ivanovich Vatin, Abdeliazim Mustafa Mohamed, Ahmed Farouk Deifalla, dan Imran Mehmood (2022) dengan judul Plastic Waste Management Strategic and Their Environmental Aspect: A Scientometric Analysis and Comprehensive Review. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa mendaur ulang plastik dapat menghasilkan berbagai produk yang akan menjadi solusi berkelanjutan karena dapat meminimalkan masalah pengelolaan limbah dan pengurangan pencemaran lingkungan.

Suman Nandy, Elvira Fortunato dan Rodrigo Martins (2022) dengan judul penelitian Green Economy and Waste Manajement: An inevitable plan

for materials science dibahas tentang penerapan teknologi yang dinamakan *green technology* yang dapat meminimalisir sampah dan polusi yang berkelanjutan agar tidak terlalu menyebar.

Shilpa Vishwakarma, Vimal Kumar, Shashi Arya, Mamta Tembhare, Rahul, Deblina Dutta, dan Suni Kumar (2022) dengan judul penelitian E-waste in Information and Communication Technology Sector: Existing Scenario, Management Schemes and initiatives. Menjelaskan bahwa dikembangkan pembuangan limbah elektronik (E-Waste) yang dihasilkan oleh sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) guna untuk menerapkan pengelolaan limbah yang dapat didaur ulang.

Tabel 1.5. Jurnal Terdahulu

No	Nama Penulis dan Tahun	Tujuan Penelitian	Teori yang digunakan	Metode yang digunakan	Hasil Penelitian
1	Hery Setiawan, Tjahya Supriatna, Sampara Lukman (2019)	<ul style="list-style-type: none"> a) Untuk menganalisis kinerja Dinas Lingkungan Hiduo b) Untuk menganalisis faktor penghambat dan pendukung c) Untuk menganalisis Strategi yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja 	Teori Kinerja Birokrasi Publik yang terdiri dari Produktivitas, kualitas pelayananan, Akuntabilitas, Responsivitas dan Responsibilitas.	Metode dalam penelitian ini, pendekatan yang ditempuh oleh peneliti yakni pendekatan Kualitatif dengan Analisis Deskriptif.	Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dalam penanganan sampah di Kabupaten bengkalis belum berjalan dengan baik
2	Ni Wayab Eni Winarsih, I Made Wimas Candranegara dan I Putu Eka Mahardika (2019)	Tujuan penelitian ini untuk mengetahui efektivitas pengelolaan sampah yang ada di Kota Denpasar	Teori Efektivitas menurut Saxena dalam Indrawijaya (2010)	Dalam penelitian ini, dua metode pengumpulan data digunakan. Metode pertama adalah teknik observasi, yang mengumpulkan data melalui pengamatan dan catatan sistematis. Metode kedua adalah teknik wawancara, yang	Pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan terakhir sampah adalah lima cara untuk menangani sampah. Pengurangan sampah menggunakan tiga metode, yaitu mengurangi,

				<p>mengumpulkan data melalui wawancara langsung dengan informan.</p> <p>Selain itu, metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.</p>	<p>mengulang, dan mengosongkan.</p>
3	Farhan Aziz Nubarakh, Rina Yulianti, Maulana Yusuf (2020)	Tujuan Penelitian ini untuk Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang dapat menangani masalah sampah yang ada di Kota Serang yang harus lebih berperan aktif agar strategi yang sudah di rencanakan dapat berjalan dengan baik	Teori Manajemen Strategi menurut J. David Hunger dan Thomas L. Wheelen (1996:9) meliputi pengamatan, perumusan strategi, implementasi, evaluasi dan pengendalian	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif.	Hasil penelitian menunjukkan pengelolaan di kota serang kurang maksimal dikarenakan program yang direncanakan masih ada hambatan
4	Daffa Nabila Faisal (2020)	Tujuan Penelitian untuk mengetahui Strategi Komunikasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak dalam Mengkampanyekan Pengurangan dan Penanganan sampah serta faktor pendukung dan penghambat	Menggunakan Teori Kebijakan Komunikasi, Perencanaan Komunikasi, dan Strategi Komunikasi	Metode yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif	Mengkampanyekan pengurangan dan penanganan sampah disampaikan melalui sosialisasi dan pelatihan serta event peringatan hari peduli sampah sedunia.

5	Muhammad Fahrizal Hasibuan (2021)	Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran dinas lingkungan hidup dalam pengelolaan sampah dan untuk mengetahui hambatan dinas lingkungan hidup di kecamatan Rambah	Teori Peran dikemukakan oleh mukti Fajar ND dan Yulianto Achmat difokuskan peran masyarakat untuk berperilaku	Dalam penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian yang bersifat kualitatif.	Dinas lingkungan hidup berupaya dalam menyediakan sarana dan prasarana. Namun, pada saat dilapangan, hasilnya belum maksimal
6	Olga Lawinska, Anna Korombel and Monika Zajemska Pyrolysis-Based Municipal Solid Waste Management in Poland Tahun 2022	Tujuan Penelitian adalah untuk menganalisis data jumlah limbah yang dihasilkan per-kapita di Polandia	Teori Analisis SWOT	Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dikarenakan menganalisis data-data yang berupa angka ataupun persen dan teori yang digunakan ialah Teori Analisis SWOT	Masih terdapat beberapa fasilitas yang belum maksimal dan juga kesadaran masyarakat akan masalah lingkungannya.
7	Nibras Abdullah, Ola A. Al-wesabi, Bidiea Abdulkarem Mohammed, Zeyad Ghaleb Al-Mekhlafi, Meshari Alazmi, Mohammad Alsaffar, Mohammed Anbar and Putra Sumari Integrated Approach to Achieve a Sustainable Organic Waste Management System in Saudi Arabia Tahun 2022	Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem atau teknik Pengelolaan Sampah yang berbasis IoT	Teori Manajemen Sistem	Metode ini menggunakan metode kuantitatif dimana terdapat analisis data tentang pengolahan dan pengelolaan sampah	Beberapa rekomendasi sudah dibuat untuk mengendalikan sampah organik yaitu pengomposan. Dan meningkatkan efisiensi pengelolaan truk pengumpul sampah.

8	<p>Saimin Huang, Hongchang Wang, Waqas Ahmad, Ayaz ahmad, Nikolai Ivanovich Vatin, Abdeliazim Mustafa Mohamed, Ahmed Farouk Deifalla, dan Imran Mehmood</p> <p>Plastic Waste Management Strategies and Their Environmental Aspect: A Scientometric Analysis and Comprehensive Review Tahun 2022</p>	<p>Tujuan Penelitian ini adalah untuk menentukan metode penanganan sampah plastik yang aman dan bermanfaat secara ekologis</p>	<p>Teori Manajemen Strategis</p>	<p>Metode ini menggunakan metode penelitian kuantitatif berupa data-data yang diperhitungkan</p>	<p>Mendaur ulang plastik menghasilkan berbagai produk akan menjadi solusi berkelanjutan dikarenakan dapat meminimalkan masalah pengelolaan limbah dan pengurangan pencemaran lingkungan</p>
9	<p>Suman Nandy, Elvira Fortunato, Rodrigo Martins</p> <p>Green economy and waste management: An inevitable plan for materials science</p> <p>Tahun 2022</p>	<p>Tujuan Penelitian ini untuk menentukan suatu ide-ide inovatif untuk mengendalikan limbah plastik</p>	<p>Teori Manajemen Limbah</p>	<p>Dalam penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian yang bersifat kualitatif,</p>	<p>Dengan membuat teknologi yang dinamakan green technology untuk meminimalkan limbah dan polusi yang berkelanjutan</p>
10	<p>Shilpa Vishwakarma, Vimal Kumar, Shashi Arya, Mamta Tembhare, Rahul, Deblina Dutta, and Suni Kumar</p> <p>E-waste in Information and Communication Technology Sector: Existing Scenario, Management Schemes and initiatives Tahun 2022</p>	<p>Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengembangkan pembuangan limbah elektronik (E-Waste) secara efisien yang dihasilkan oleh sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)</p>	<p>Teori Manajemen Komunikasi dan Informasi</p>	<p>Dalam penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian yang bersifat kualitatif.</p>	<p>Menerapkan pengelolaan limbah elektronik untuk mendaur ulang</p>

Penelitian telah menunjukkan bahwa strategi sangat penting bagi organisasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat karena berusaha untuk memperbaiki kondisi internal maupun eksternal (Masyarakat). Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi internal antara lain kebijakan instansi, kinerja pegawai serta fasilitas atau sarana prasarana. Sedangkan faktor eksternalnya yakni kesadaran masyarakat, faktor ekonomi dan pengetahuan atau sosialisasi dari instansi. Perlu dilakukannya strateg dalam meningkatkan pelayanan karena menjaga kebersihan lingkungan adalah hal yang paling penting. Pengelolaan sampah merupakan proses yang harus ditangani dengan serius untuk kesehatan masyarakat dan kebersihan lingkungannya.

Kemajuan teknologi dan fasilitas sarana prasarana untuk mengelola sampah ditingkatkan dengan komitmen penuh dari pemerintah khususnya dari Instansi yang menangani permasalahan sampah. dari beberapa penekiti juga memiliki 2 metode dalam merumuskan strategi yakni metode kuantitatif dan kualitatif.

Metode kuantitatif, terdapat beberapa strategi khususnya dalam peningkatan fasilitas yang akan digunakan dalam menangani permasalahan sampah ataupun limbah. Beberapa data-data pengumpulan sampah atau juga data-data pencemaran lingkungan yang menjadikan pedoman untuk merumuskan suatu strategi dan inovasi guna meminimalisir pencemaran lingkungan. Sedangkan metode kualitatif, peneliti memiliki beberapa dokumen-dokumen atau hasil wawancara dengan pihak yang terkait tentang

pengelolaan sampah yang baik dan merumuskan beberapa strategi guna meminimalisir terjadinya pencemaran lingkungan.

1.5.2. Administrasi Publik

Administrasi berasal dari bahasa Inggris "administration", dengan infinitifnya "to administer", yang berarti "mengelola". Dalam bahasa Belanda, administrasi berarti "administratie", yang berarti manajemen sumber daya, tata usaha, dan kegiatan organisasi.

"Administrasi Publik adalah proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola keputusan-keputusan dalam publik," kata Chander dan Plano dalam Keban (2004: 3). Namun, seperti yang dijelaskan oleh Henry dalam Harbani Pasolong (2008: 8), administrasi publik adalah gabungan teori dan praktik yang rumit. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman tentang bagaimana pemerintah berhubungan dengan masyarakat yang diperintahkan dan mendorong kebijakan publik untuk lebih memperhatikan kebutuhan sosial.

Menurut Edward H. Litchfield (1956:1), dalam bukunya *Notes on a General Theory of Administration*, "Administrasi Publik adalah suatu sandi mengenai bagaimana bermacam-macam badan pemerintahan diorganisasikan, diperlengkapi dengan tenaga-tenaganya, dibiayai, digerakkan, dan dipimpin." Definisi ini menunjukkan bahwa administrasi publik adalah aspek penting dari bagaimana suatu badan

pemerintahan atau lembaga pemerintahan dikumpulkan, digerakkan, dan dipimpin.

Dalam buku *The Study of Public Administration*, Dwight Waldo (1955) menyatakan, "Administrasi Publik adalah manajemen dan organisasi dari manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan pemerintah." Administrasi publik didefinisikan sebagai manajemen dan suatu organisasi yang terdiri dari manusia dan peralatan, seperti sarana dan prasarana. Jumlah orang yang terlibat, jenis tujuan yang ingin dicapai, ruang lingkup, dan tujuan akhir adalah semua faktor yang membentuk administrasi publik.

Sebagai kesimpulan dari berbagai definisi administrasi publik, kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanakan tugas pemerintah untuk mencapai tujuan pemerintah secara efisien dan efektif dan memenuhi kebutuhan publik.

1.5.3. Paradigma Administrasi Publik

Thomas S. Khun (Syafiie, 2010:26) mendefinisikan paradigma sebagai suatu pendekatan, nilai-nilai, metode, prinsip dasar, atau pendekatan untuk memecahkan masalah yang dianut oleh suatu komunitas ilmiah pada waktu tertentu. Dengan kata lain, paradigma adalah cara seseorang atau sekelompok orang berpikir. Dalam Keban (2014:31-33) Nicholas Henry menyatakan bahwa ada lima paradigma administrasi negara, yang diuraikan sebagai berikut:

- 1) Paradigma 1 : Dikotomi Politik dan Administrasi (1900-1926)

Pada paradigma ini, administrasi harus dipandang sebagai sesuatu yang bebas nilai dan diarahkan untuk mencapai nilai efisiensi dan ekonomi dari government bureaucracy. Paradigma ini lebih menekankan pada lokus saja yaitu “government bureaucracy” namun kurang menekankan pada fokus.

2) Paradigma 2 : Prinsip-Prinsip Administrasi (1927-1937)

Dalam paradigma ini yang menjadi fokus adalah prinsip-prinsip administrasi yang dikemukakan oleh Gulick dan Urwick yaitu: Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting Budgeting. Prinsip tersebut memiliki fokus yang bersifat universal sementara fokus dapat diterapkan baik pada organisasi pemerintah maupun swasta

3) Paradigma 3 : Administrasi Sebagai Ilmu Politik (1950-1970)

Paradigma yang mempertanyakan pemisahan politik dan administrasi sebagai suatu yang tidak mungkin atau tidak realistis, sementara Herbert Simon mengarahkan kritiknya terhadap ketidakkonsistenan prinsip administrasi, dan menilai bahwa prinsip- prinsip tersebut tidak berlaku universal. Dalam 12 konteks ini, administrasi negara bukannya value free atau dapat berlaku dimana saja, tapi justru dipengaruhi nilai-nilai tertentu. Disini terjadi pertentangan antara anggapan mengenai value free administration

4) Paradigma 4 : Administrasi Negara sebagai Ilmu Administrasi (1956-1970)

Terdapat dua arah perkembangan pada paradigma ini yaitu ilmu administrasi murni yang didukung oleh disiplin psikologi sosial dan yang berorientasi pada kebijakan publik. Fokus pada paradigma ini adalah perilaku organisasi, analisis manajemen, dan penerapan teknologi modern yang diasumsikan dapat diterapkan baik pada dunia bisnis maupun dunia administrasi publik sehingga lokus menjadi tidak jelas.

5) Paradigma 5 : Administrasi Publik Sebagai administrasi Publik
Paradigma ini telah memiliki fokus dan lokus yang jelas. Fokus Administrasi Publik dalam paradigma ini adalah teori organisasi, teori manajemen dan kebijakan publik sedangkan lokus nya adalah masalah-masalah dan kepentingan publik.

6) Governance

Apabila sumber daya dan masalah publik dikelola dengan baik dan efisien, governance dapat dianggap baik atau baik. Pasti dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan masyarakat. Sebagaimana dinyatakan oleh Program Pembangunan Dunia (UNDP), governance adalah bentuk pelaksanaan kekuasaan politik, ekonomi, dan administrasi untuk mengelola masalah yang dihadapi suatu bangsa, yang mencakup semua sektornya.

Penelitian ini termasuk paradigma ke-5 dimana instansi pemerintah perlu untuk membuat suatu kebijakan yang mengacu atau berkaitan dengan kepentingan publik. Hal itu dapat mengacu ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Rembang dalam menentukan suatu kebijakan tentang pengelolaan sampah.

1.5.4. Manajemen Strategi

Menurut Nicholas S. Majluk dan Arnolfo C. Hax, manajemen strategis adalah cara untuk membantu perusahaan mencapai sejumlah target. Target tersebut dapat termasuk nilai dan tanggung jawab perusahaan atau korporasi, sistem administrasi yang menangani pengambilan langkah atau keputusan operasional dan strategis di berbagai tingkat hierarki, dan kemampuan manajer. Oleh karena itu, secara umum, manajemen strategis didefinisikan sebagai kumpulan tindakan dan keputusan penting yang diterapkan oleh seluruh anggota organisasi dan diambil oleh manajemen puncak. Tujuannya adalah untuk mencapai visi dan misi perusahaan dan mewujudkannya.

Beberapa konsep dalam manajemen strategi meliputi :

- 1) Menganalisis kinerja lingkungan (internal dan eksternal)
- 2) Membina pimpinan organisasi (misi dan objektivitas)
- 3) Merumuskan strategi organisasi
- 4) Mengimplementasikan strategi
- 5) Menetapkan strategi pengawasan

Menurut Wheelen dan Hunger (2012:16) ada empat unsur manajemen strategis sebagai berikut:

- a. *Environmental Scanning* (Analisis lingkungan) adalah proses melacak, mengevaluasi, dan menyebarkan informasi tentang lingkungan organisasi kepada anggota organisasi dengan tujuan mengukur nilai lingkungan organisasi secara keseluruhan, yang akan mempengaruhi masa depan organisasi.
- b. *Strategy formulation* (formulasi strategi) merupakan peningkatan dari pendekatan jangka panjang yang bertujuan untuk menciptakan tata kelola manajemen yang kuat yang memanfaatkan peluang dan ancaman dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan organisasi.

Perumusan strategis mencakup hal-hal berikut:

- 1) Misi adalah alasan organisasi ada dan menggambarkan aktivitas dan sasarannya.
- 2) Tujuan adalah hasil dari aktivitas perencanaan
- 3) strategi adalah penjelasan tentang bagaimana organisasi dapat mencapai visi yang telah direncanakan sebelumnya.
- 4) Kebijakan, yang merupakan panduan luas yang menggabungkan perumusan strategi dan implementasi, kemudian dieksposisikan dan dilaksanakan dengan menggunakan strategi dan tujuan masing-masing.

c. *Strategy implementation* (implementasi strategi) merupakan suatu fase di mana kebijakan dan strategi melakukan berbagai tugas melalui pembuatan program, anggaran, dan prosedur.

1) Program adalah daftar langkah-langkah atau aktivitas yang digunakan untuk mencapai perencanaan dalam satu kali penggunaan;

2) Anggaran adalah program yang dinyatakan dalam bentuk satuan uang, dan setiap program digambarkan secara rinci dalam biaya yang dapat digunakan oleh manajemen untuk merencanakan atau mengendalikan; dan

3) prosedur adalah sistem teknik yang terurut yang menunjukkan secara rinci bagaimana suatu pekerjaan diselesaikan.

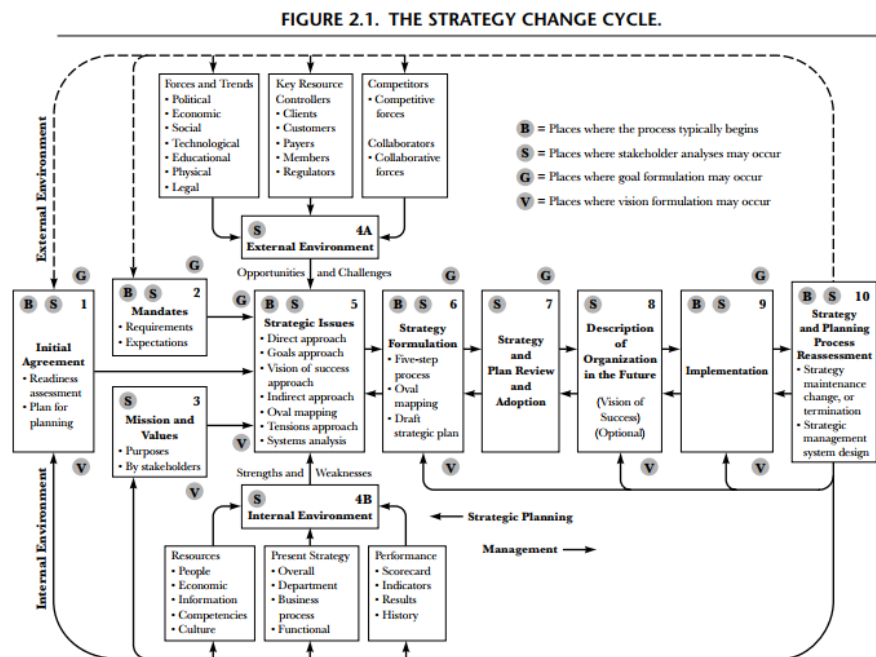
d. *Evaluation and control* (evaluasi dan kontrol) adalah sebuah proses kegiatan dan pencapaian hasil dari suatu organisasi yang dimonitor sehingga hasil yang telah tercapai dapat dibandingkan dengan hasil yang diharapkan

1.5.5. Perencanaan Strategi

Perencanaan strategi mengutamakan prospek. Ini melibatkan upaya disipliner untuk membantu membentuk dan membimbing persepsi manajemen tentang apa yang harus mereka lakukan, apa yang harus mereka lakukan, dan mengapa mereka harus melakukannya. Informasi

diperlukan untuk perencanaan strategis (Gaspersz, 2004:3).

Perencanaan strategi adalah masalah. Berikut ini adalah delapan tahapan strategis yang harus diperhatikan oleh organisasi publik dan nonprofit, menurut Bryson (2007).



Gambar 1.2. Langkah Perencanaan Strategi menurut Bryson (2007)

Dengan penjelasan sebagai berikut.

A. Memprakarsai dan menyepakati proses perencanaan strategis

Langkah pertama adalah mencapai kesepakatan tentang seluruh upaya perencanaan strategis dan langkah-langkah perencanaan yang paling penting dengan orang-orang penting (pembuat keputusan) atau pembentuk opini (pemimpin opini) di dalam dan di luar organisasi.. Salah satu tanggung jawab pemrakarsa adalah menentukan dengan tepat siapa yang termasuk dalam kelompok pembuat keputusan yang

penting. Selanjutnya adalah menentukan anggota kelompok, unit, atau organisasi mana yang harus terlibat dalam perencanaan.

B. Memperjelas mandate organisasi

Mandate formal dan informal yang ditempatkan pada organisasi adalah “keharusan” yang dihadapi organisasi

C. Memperjelas misi dan nilai-nilai organisasi

Ini berarti bahwa organisasi, pemerintah, atau nirlaba harus berusaha untuk memenuhi kebutuhan sosial dan politik. Namun, mendirikan organisasi memerlukan lebih dari sekedar menetapkan misi. Mengklarifikasi maksud dapat membantu mengatur diskusi dan kegiatan secara produktif dan mengurangi banyak konflik yang tidak perlu dalam suatu organisasi.

D. Menilai lingkungan eksternal

Tim perencanaan harus melihat lingkungan eksternal organisasi untuk mengidentifikasi ancaman dan peluang. Sebenarnya, organisasi mengontrol faktor "di dalam", tetapi tidak faktor "di luar" (Preffer dan Salancik, 1978).

E. Menilai lingkungan internal

Agar dapat mengenali kekuatan dan kelemahan internal, organisasi harus memantau sumber daya (inputs), strategi sekarang (Process) dan kinerja (output).

F. Mengidentifikasi isu strategis yang dihadapi organisasi

Secara khas, perencanaan itu merupakan masalah yang sangat penting bahwa isu-isu strategis yang dihadapi dengan cara terbaik dan efektif jika organisasi ingin mempertahankan kelangsungan hidup dan berhasil baik. organisasi yang tidak menanggapi isu strategis dapat menghadapi akibat yang tak diinginkan dari ancaman, peluang yang lenyap, atau keduanya.

G. Merumuskan strategi untuk mengelola isu-isu

Strategi didefinisikan sebagai pola tujuan, kebijakan, program, bagaimana organisasi, apa yang dikerjakan organisasi, mengapa organisasi harus mengerjakan hal itu. Strategi dapat berbeda-beda karena tingkat, fungsi dan kerangka waktu.

H. Deskripsi Masa Depan Organisasi (Visi Misi)

Organisasi mengembangkan deskripsi mengenai bagaimana seharusnya organisasi itu sehingga berhasil mengimplementasikan strateginya dan mencapai seluruh potensi.

I. Implementasi Rencana Tindak

Rencana implementasi yakni dokumen yang menjelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan tim untuk mencapai tujuan atau strategi bersama. Tujuan rencana implementasi adalah untuk memastikan bahwa tim dapat menentukan siapa, apa, kapan, bagaimana, dan mengapa dari proyek sebelum melanjutkan ke fase eksekusi.

Sederhananya, ini adalah rencana tindakan yang mengadaptasi strategi untuk menyelesaikan tugas tertentu.

J. Hasil dan Replanning

Perencanaan ulang adalah tindakan yang dilakukan oleh para perencana ketika program atau proyek terhambat dan tindakan harus diambil. Perencanaan ulang pada dasarnya merupakan tindakan setelah evaluasi atau pengawasan, yang biasanya dilakukan ketika hal-hal perlu diluruskan.

Berdasarkan teori Perencanaan Strategi, indikator-indikator yang digunakan yaitu menilai lingkungan internal, menilai lingkungan eksternal, dan dan merumuskan strategi dalam mengelola isu-isu. Beberapa indikator diatas, dapat membantu dalam menyusun lingkungan strategis yang berupa analisis SWOT pada Strategi Pengelolaan Sampah di Kabupaten Rembang.

1.5.5.1. Analisis Lingkungan Strategis

Lingkungan modern mengalami perubahan besar sebagai akibat dari globalisasi. Untuk memahami alasan mengapa analisis lingkungan ini diperlukan, diperlukan sistem teori yang luas. Teori ini menyatakan bahwa sistem yang terbuka lebih mirip dengan organisasi modern. Hubies (2014: 32-33) menyatakan bahwa tujuannya adalah sebagai berikut: a) memberi manajemen kemampuan untuk menanggapi masalah lingkungan, b) mempelajari kondisi lingkungan masa depan perusahaan dan memasukkannya ke dalam proses pengambilan

keputusan organisasi, dan c) menemukan masalah lingkungan yang nyata dan mendesak. Ada dua lingkungan strategis dalam analisis lingkungan, yaitu:

1. Lingkungan internal juga dapat digunakan untuk menentukan kekuatan dan kelemahan. Sumber daya manusia harus memiliki pengalaman, kesetiaan, dan komitmen, menurut Menurut Budiman (2010: 42). Sumber daya manusia diperlukan untuk menjalankan suatu proses.

Menurut Yunus (2016:87) perlunya mengidentifikasi lingkungan internal terdapat beberapa manfaat yaitu:

- a) Peningkatan kualitas pelayanan
 - b) Peningkatan efisiensi
 - c) Peningkatan Sumber Daya Manusia
2. Lingkungan eksternal

Menurut Yunus (2016:62), analisis lingkungan eksternal mencakup pemahaman tentang berbagai elemen di luar organisasi yang memberikan dan menghalangi peluang bagi organisasi. Untuk memilah masalah global yang dihadapi organisasi dalam bentuk, fungsi, dan hubungannya, analisis ini bertujuan untuk mencapai tujuan ini. Selain menilai kesempatan dan ancaman, analisis ini menentukan hasil analisis lingkungan eksternal.

Menurut ahli, perencanaan strategi mencakup perencanaan organisasi saat membuat program dan kegiatan. Penilaian terhadap kondisi internal dan eksternal diberikan oleh perencanaan strategis; perencanaan yang dirancang dengan baik dan matang akan menghasilkan pelayanan masyarakat yang berkualitas. Perencanaan strategis juga dapat digunakan sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan masyarakat. Analisis lingkungan strategi adalah bagian dari proses perencanaan strategi. Kondisi internal dan eksternal organisasi saat ini harus diketahui melalui analisis lingkungan ini. Kondisi internal terdiri dari kekuatan dan kelemahan organisasi; kondisi eksternal terdiri dari faktor ekonomi sosial budaya dan politik, serta faktor politik.

1.5.5.2. Analisis SWOT

Analisis SWOT adalah studi menyeluruh tentang kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman organisasi. Analisis SWOT juga membantu para perencana strategi saat mereka membuat dan menerapkan strategi mereka untuk mencapai tujuan mereka. Dengan menggunakan analisis SWOT, analisis lingkungan organisasi (internal dan eksternal) dilakukan (Yunus, 2016:83). Berikut merupakan penjelasan SWOT :

1. Kekuatan (*Strenghts*)

Kekuatan adalah faktor pendorong yang berasal dari dalam organisasi. Faktor-faktor ini termasuk sumber daya, keterampilan, atau keunggulan lain yang terkait dengan pesaing dan kebutuhan pelanggan yang dapat dilayani oleh organisasi yang diharapkan dapat melayani pelanggannya dengan maksimal dan dengan cara yang dapat dioptimalkan sehingga berkontribusi positif pada pengembangan organisasi dan pelaksanaan program kerja. Organisasi melakukan upaya untuk menerapkan taktik yang memanfaatkan kekuatan.

Sumber daya manusia yang berkualitas tinggi dapat menentukan kekuatan seseorang. Jika suatu institusi memiliki kekuatan yang terkait dengan lingkungannya, dapat dianalisis apakah kekuatan tersebut diperlukan atau memiliki potensi untuk mempengaruhi lingkungan tersebut. Jika ada institusi lain yang memiliki kekuatan yang sama, kekuatan mereka harus diukur dari sudut pandang kekuatan relatif masing-masing institusi. Kekuatan adalah kompetisi khusus yang memberikan keunggulan kompetitif bagi organisasi. Hal pertama yang harus dilakukan oleh setiap organisasi dalam analisis ini adalah menilai kekuatan mereka.

Saat ini, kemampuan ini dapat digunakan untuk meningkatkan nilai dan kemajuan organisasi atau program.

Kekuatan dapat berupa keunggulan yang dimiliki oleh organisasi atau sumber dana dan dana yang harus dikelola dan dikelola. Kekuatan ini ditemukan di dalam organisasi. Sangat penting bagi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Rembang untuk memahami dasar dinas tersebut.

Komponen dalam kekuatan yakni (Yunus, 2016:83)

- a) Jumlah tenaga kerja dalam organisasi;
- b) Struktur organisasi yang sesuai;
- c) Kerja sama yang baik antara anggota; dan
- d) Ketersediaan sarana dan prasarana

2. Kelemahan (*weakness*)

Kelemahan adalah ketika suatu organisasi mengalami keterbatasan atau kekurangan sumber daya, keterampilan, atau kapabilitas yang secara efektif menghambat kinerjanya. Keterbatasan ini dapat berasal dari sumber daya keuangan, fasilitas, keterampilan manajemen dan staf, sarana dan prasarana yang tidak memadai, atau sumber daya manusia yang tidak cukup. Kelemahan dapat didefinisikan sebagai keadaan atau kondisi saat ini suatu organisasi, operasinya, atau sumber daya yang tidak dimiliki organisasi.

Organisasi berusaha menghilangkan kekurangan internal dalam upayanya untuk menerapkan rencana. Kelemahan juga dapat diidentifikasi oleh tujuan perusahaan. Ini mirip dengan

banyaknya keluhan yang diterima organisasi oleh orang-orang di masyarakat yang tidak menginginkannya, yang mengakibatkan reputasi buruk organisasi. Jika suatu institusi mengetahui bahwa kelemahan tersebut terkait dengan lingkungannya, mereka dapat menganalisis apakah kelemahan tersebut dapat berdampak pada lingkungan sekitarnya. Salah satu cara yang dapat menghalangi kemajuan sebuah organisasi adalah dengan menganalisis kekurangan yang ada. Kesalahan ini dapat menghambat kemajuan perusahaan.

Terkadang lebih mudah untuk melihat kelemahan daripada kekuatan; namun, ada beberapa situasi di mana kelemahan tidak mendapat solusi yang tepat karena ketidakmampuan untuk memaksimalkan kekuatan yang sudah ada. bagian dari kelemahan, misalnya (Yunus, 2016:84):

- a) Kualitas dan profesionalisme tenaga kerja manusia organisasi
- b) Pengelolaan dalam organisasi
- c) Minimnya sarana dan prasarana

3. Peluang (*Opportunity*)

Peluang adalah situasi penting yang menguntungkan di dalam organisasi. Peluang juga merupakan faktor positif dari lingkungan, karena memberikan kesempatan bagi program atau organisasi untuk berkontribusi pada perkembangan dan

stabilitas organisasi. Jika dilakukan, ini bisa dianggap sebagai sesuatu yang menguntungkan, tetapi juga bisa merugikan. Suatu organisasi tidak dapat mengontrol peluang. Di masa depan, hal-hal ini dapat menjadi peluang untuk kemajuan perusahaan.

Dengan memanfaatkan peluang ini, perusahaan dapat menemukan cara untuk berkembang di masa depan atau masa yang akan datang. Kebijakan, modal, atau solusi masalah dapat merupakan peluang. Ada tiga tingkat peluang, yaitu

- a) Low, jika memiliki daya tarik dan manfaat yang besar, tetapi peluang untuk mencapainya juga kecil;
- b) Moderate, jika memiliki daya tarik dan manfaat yang besar, tetapi peluang untuk mencapainya juga kecil; dan
- c) Best, jika memiliki daya tarik dan manfaat yang tinggi, tetapi peluang untuk mencapainya juga besar. Komponen dalam peluang yakni (Yunus, 2016:85) :

- 1) Partisipasi dan dukungan masyarakat
- 2) Kebutuhan pelayanan yang tinggi
- 3) Peraturan hukum

4. Ancaman (*Threats*)

Ancaman adalah situasi penting yang tidak menguntungkan bagi lingkungan perusahaan. Selain itu, mereka merupakan elemen lingkungan yang tidak menyenangkan, yang mencegah

program dan organisasi berkembang atau bertahan. Ini dianggap sebagai pengganggu utama untuk posisi saat ini atau yang diinginkan perusahaan. Peraturan pemerintah yang baru atau yang diubah dapat membahayakan kesuksesan bisnis.

metode untuk menganalisis risiko yang harus dihadapi oleh suatu organisasi untuk mengatasi berbagai elemen lingkungan yang tidak menguntungkan yang berpotensi menyebabkan kemunduran. Ancaman tersebut akan menghalangi usaha yang relevan baik sekarang maupun di masa depan jika tidak diatasi segera. Banyak orang yang ingin melawan arus membuat ancaman ini selalu terlewatkan, tetapi organisasi itu lebih banyak layu sebelum berkembang.

Ancaman dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a) Ancaman untuk (*Major Threats*) adalah ancaman yang memiliki kemungkinan terjadinya tinggi dan dampaknya besar;
- b) Ancaman tidak utama (*Minor Threats*) adalah ancaman yang dampaknya kecil dan kemungkinan terjadinya kecil;
- c) Ancaman moderate (*Moderate Threats*) berupa ancaman yang memiliki tingkat keparahan yang tinggi tetapi kemungkinan terjadinya rendah, atau sebaliknya. Ada elemen bahaya (Yunus, 2016:86):

- 1) Kesadaran dan pemahaman masyarakat
- 2) Lingkungan kerjasama dengan pihak luar tidak berjalan
- 3) Persepsi masyarakat
- 4) Penguasaan teknologi

1.5.5.3. Merumuskan Strategis

Membangun visi dan misi organisasi, menetapkan tujuan strategis, dan merancang strategi untuk mencapai tujuan tersebut dengan memberikan value terbaik kepada pelanggan adalah proses yang dikenal sebagai perumusan strategi.

Untuk menggambarkan empat jenis strategi yaitu (Yunus, 2016:86):

a. Strategi SO

Strategi ini berasal dari cara perusahaan berpikir: memanfaatkan seluruh kekuatan untuk memanfaatkan peluang.

b. Strategi ST

Strategi untuk menggunakan kekuatan perusahaan untuk menangani ancaman

c. Strategi WO

Strategi ini berfokus pada memanfaatkan peluang saat ini dengan mengurangi kelemahan saat ini.

d. Strategi WT

Strategi ini menggunakan tindakan pertahanan untuk meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman.

Untuk menyesuaikan organisasi dengan lingkungannya, analisis SWOT digunakan sebagai standar. Strategi ini memanfaatkan kekuatan internal untuk memanfaatkan peluang eksternal. Strategi ini memungkinkan organisasi untuk berkembang.

Menurut pemaparan yang relevan, perencanaan strategi adalah tindakan yang diambil untuk menentukan strategi, kinerja, dan tujuan organisasi. Analisis swot termasuk dalam perencanaan strategi, yang merupakan metode untuk membuat strategi dan menentukan lingkungan internal dan eksternal. Namun, menurut Herry Achmad Buchoru dan Djaslim Saladin (2006:48) perencanaan strategi pada lingkungan internal adalah untuk menganalisis hubungan antara strategi perusahaan dan tanggapan terhadap lingkungan, menganalisis kecenderungan faktor dan masalah utama yang diperkirakan mempengaruhi perumusan strategi.

Sedangkan lingkungan eksternal memiliki komponen analisis terdiri dari:

- a) Scanning
- b) Monitoring
- c) Forecasting
- d) Accessing

1.5.6. Pengertian Sampah

Sampah harus dikelola dengan sebaik-baiknya untuk mencegah dampak negatif pada kehidupan, karena, menurut Azwar (1990), sampah adalah barang yang tidak dapat digunakan lagi, tidak disenangi, dan harus dibuang. Sampah didefinisikan oleh Kodaoatie (2003) sebagai limbah atau buangan padat atau setengah padat yang merupakan hasil dari aktivitas perkotaan atau siklus kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan (Suryani, 2014).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012, sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari aktivitas sehari-hari dalam rumah tangga, kecuali tinja dan sampah spesifik. Sampah sejenis ini juga termasuk sampah dari kawasan komersial, industri, khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.

1.5.7. Manajemen Pengelolaan Sampah

Menurut PP No. 81 Tahun 2012, yang mengatur pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenisnya, pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang mencakup pengurangan dan penanganan sampah. Lima elemen membentuk sistem pengelolaan sampah minimal: hukum, kelembagaan, operasional, pembiayaan, dan partisipasi masyarakat.

1) Teknik Operasional

Element teknis operasional dalam pengelolaan sampah dapat dilihat dan digunakan secara fisik. Semua proses pemilahan dan

pewadahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir semuanya termasuk dalam kategori ini. Selama proses perwadahan hingga pembuangan akhir sampah, pemilahan dan daur ulang harus dilakukan semaksimal mungkin. Ini berarti bahwa teknik operasional pengelolaan sampah perkotaan yang terdiri dari proses perwadahan hingga pembuangan akhir sampah harus diintegrasikan dengan melakukan pemilahan sampah sejak dari sumbernya. Pengendalian B3 rumah tangga secara khusus diawasi sesuai dengan aturan yang berlaku. Pengumpulan pemindahan juga dapat mencakup pemilihan. Daur ulang dan pemilihan sangat penting.

2) Kelembagaan

Aspek Kelembagaan merupakan suatu kegiatan yang multi disiplin yang bertumpu pada prinsip teknik dan manajemen yang menyangkut aspek-aspek ekonomi, sosial, budaya, dan kondisi fisik wilayah kota dan memperhatikan pihak yang dilayani yaitu masyarakat kota. perancangan dan pemilihan bentuk organisasi disesuaikan dengan:

- Peraturan pemerintah yang membentuknya
- Pola sistem operasional yang diterapkan
- Kapasitas sistem untuk menyelesaikan lingkup pekerjaan dan tugas yang perlu diselesaikan

3) Peraturan/hukum

Peraturan dasar yang diperlukan untuk menjalankan sistem pengelolaan sampah perkotaan di Indonesia termasuk aturan tentang organisasi, pemungutan, retribusi, dan ketertiban masyarakat. Peraturan ini termasuk:

- Ketertiban umum yang terkait dengan penanganan sampah
- Rencana induk pengelolaan sampah kota
- Bentuk lembaga dan organisasi pengelola
- Tata cara penyelenggaraan pengelolaan
- Besaran tarif jasa pelayanan atau retribusi kerjasama dengan berbagai pihak terkait, diantaranya kerjasama antar daerah atau kerjasama dengan pihak swasta

4) Sumber Pembiayaan

Sebagaimana kegiatan yang lain, maka komponen pembiayaan sistem pengelolaan sampah kota secara ideal dihitung berdasarkan:

- Biaya investasi
- Biaya operasi dan pemeliharaan
- Biaya manajemen
- Biaya untuk pengembangan
- Biaya penyusunan dan pembinaan masyarakat

5) Peran serta masyarakat

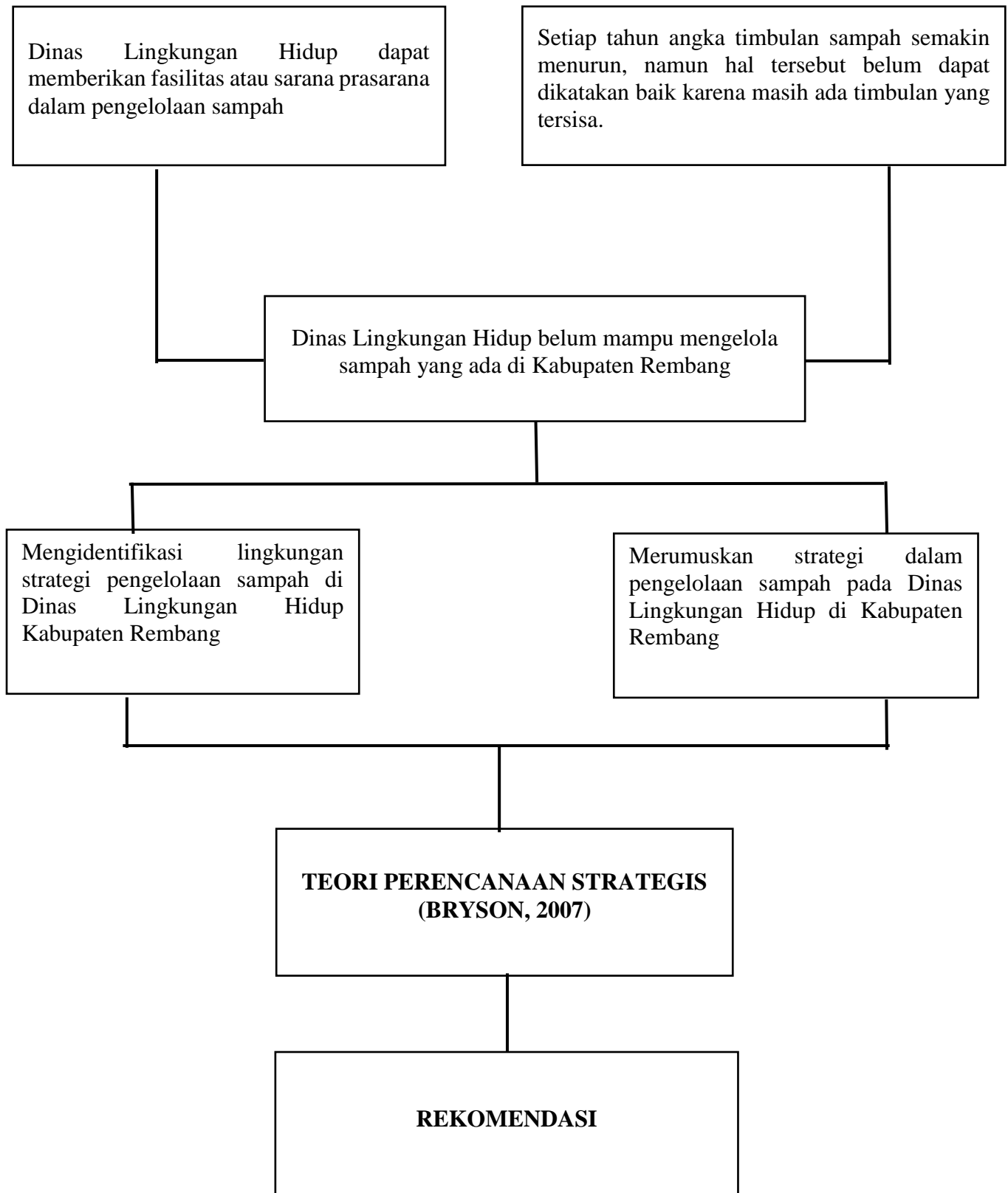
Salah satu cara bagi masyarakat untuk membantu program pemerintah dalam kebersihan adalah dengan membiasakan orang untuk berperilaku sesuai dengan tujuan program tersebut.

Tujuan-tujuan ini termasuk:

- Bagaimana persepsi masyarakat tentang pengelolaan sampah yang tertib dan teratur telah berubah
- Faktor-faktor sosial, struktur, dan budaya setempat yang mempengaruhi kebiasaan pengelolaan sampah yang telah ada sebelumnya

1.6. Kerangka Pikir Penelitian

Tabel 1.6. Kerangka Pikir



1.7. Operasional Konsep

Sampah adalah limbah yang dihasilkan dari operasi produksi, baik industri maupun rumah tangga, yang dapat dikelola melalui sistem pengelolaan sampah. Studi ini akan mempelajari beberapa fenomena yang berkaitan dengan strategi penanganan dan pengelolaan sampah yang tercantum dalam Rencana Strategi (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang 2021–2026.

Untuk menjawab rumusan masalah yang telah disebutkan yakni tentang merumuskan strategi tentang pengelolaan sampah dan faktor penghambat, fenomena ini adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi lingkungan strategis yang terdiri dari lingkungan internal dan eksternal
 - a) Lingkungan internal adalah lingkungan dalam organisasi. Berbagai kekuatan dan kelemahan yang dimiliki organisasi. Beberapa faktor yang mempengaruhi lingkungan internal antara lain: Visi Misi Organisasi, Regulasi, Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana, dan Anggaran
 - b) Lingkungan eksternal adalah lingkungan yang tidak ada hubungannya dengan organisasi. Organisasi memiliki banyak peluang dan risiko. Beberapa faktor eksternal termasuk faktor ekonomi masyarakat, faktor sosial dan budaya, jumlah masyarakat, keterlibatan pihak lain, dan teknologi informasi.

2. Merumuskan Strategi Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Rembang

Rencana Strategi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang 2021–2026 menyebutkan beberapa strategi yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk mengelola sampah. Strategi-strategi ini meliputi 1) pengurangan sampah melalui pembatasan, daur ulang, dan pemanfaatan kembali; 2) melalui pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir di TPA; dan 3) penyediaan sarana dan prasarana untuk mengelola sampah.

Tabel 1.7 Operasional Konsep Perencanaan Strategis

No	Faktor	Gejala	Sub Gejala	Pertanyaan
1	Analisis Lingkungan Strategi	Menilai lingkungan internal	Visi Misi Organisasi	<ol style="list-style-type: none"> 1) Bagaimana visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan Sampah Kabupaten Rembang? 2) Siapa aja yang bertanggung jawab atas pengelolaan sampah di kabupaten Rembang?apakah ada pihak lain yang terkait? 3) Bagaimana komitmen DLH dalam melaksanakan misi yang telah dibuat? 4) Apakah ada program yang dilakukan untuk mengelola sampah dan menangani sampah? 5) Sejak kapan program tersebut berjalan? 6) Apakah program pengelolaan sampah selama ini sudah berjalan dengan baik?
			Regulasi	<ol style="list-style-type: none"> 7) Apakah Upaya yang dilakukan telah sesuai dengan kebijakan atau regulasi yang ada pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang?

				<p>8) Apakah Kebijakan dari Aktivis lingkungan atau BSI dalam mengelola sampah di Kabupaten Rembang?</p> <p>9) Apakah terdapat SOP dalam Pelayanan maupun Pengelolaan Sampah?</p>
			Sumber Daya Manusia	<p>10) Berapa sumber daya yang bertanggung jawab dalam membersihkan dan mengelola sampah?</p> <p>11) Apakah kegiatan membersihkan sampah atau pengangkutan dilakukan secara rutin setiap hari?</p> <p>12) Bagaimana pembagian tugas antar pegawai agar dapat menjangkau seluruh sasaran</p>
			Sarana dan Prasarana	<p>13) Bagaimana sarana dan prasarana saat ini untuk mengelola sampah di TPA?</p> <p>14) Apakah pihak UPT sudah memberikan fasilitas kepada masyarakat untuk mengelola atau membuang sampah yang akan diangkut ke TPA?</p> <p>15) Adakah upaya pembaharuan atau pengadaan sarana/fasilitas baru guna menunjang aktivitas pengelolaan sampah?</p> <p>16) Bagaimana proses atau tahapan pengelolaan sampah yang dilakukan?</p>

				<p>17) Hambatan atau kendala yang dialami dalam mengelola sampah?</p> <p>18) Bagaimana solusi apabila lahan yang digunakan TPA semakin sempit?</p>
			Anggaran	<p>19) Bagaimana perealisasiian Anggaran untuk Pengelolaan Sampah di Kabupaten Rembang?</p> <p>20) Bagaimana pembiayaan yang dikeluarkan untuk memfasilitasi Pengelolaan Sampah?</p> <p>21) Apa strategi yang digunakan agar sumber dana tersebut dapat mencukupi aktivitas-aktivitas terkait pengelolaan sampah?</p>
		Menilai Lingkungan Eksternal	Faktor Ekonomi Masyarakat	<p>22) Bagaimana dampak sampah terhadap ekonomi di masyarakat?</p> <p>23) Apakah sampah dapat bernilai ekonomis?</p>
			Faktor Sosial dan Budaya	<p>24) Bagaimana upaya yang dilakukan DLH untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah?</p> <p>25) Bagaimana partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah?</p> <p>26) Bagaimana semangat kerja pegawai yang bertugas mengelola sampah?</p>

				27) Bagaimana kerjasama antar pegawai di dalam organisasi?
			Partisipasi Masyarakat	<p>28) Bagaimana cara DLH menampung aspirasi masyarakat khususnya dalam layanan persampahan?</p> <p>29) Bagaimana DLH untuk mengatasi permasalahan sampah yang terjadi akibat jumlah masyarakat yang terus menerus meningkat?</p> <p>30) Apa peran masyarakat dalam mendukung kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sampah?</p> <p>31) Bagaimana tanggapan anda sebagai masyarakat terkait kinerja DLH dalam pengangkutan sampah sampai di TPA?</p> <p>32) Apa harapan anda terhadap DLH dalam menangani permasalahan sampah di Kabupaten Rembang?</p>
			Keterlibatan Pihak Lain	<p>33) Bagaimana terbentuknya aktivis lingkungan yang disebut Bank Sampah Induk (BSI) ini? Apakah ada visi misi yang hendak dicapai BSI?</p> <p>34) Apakah koordinasi dengan pihak lain yang terlibat cukup baik?</p>

			Teknologi Informasi	<p>35) Teknologi apa yang digunakan oleh DLH dalam mengelola sampah?</p> <p>36) Bagaimana pengaruh kemajuan teknologi alat-alat yang digunakan untuk mengelola sampah?</p> <p>37) Apakah DLH Kabupaten Rembang sudah sepenuhnya memanfaatkan teknologi tersebut?</p>
2	Perumusan Strategi	Merumuskan Strategi	Identifikasi isu-isu strategis	<p>38) Bagaimana Proses Pengelolaan Sampah yang ada di TPA?</p> <p>39) Apa sistem yang dipakai dalam pengelolaan sampah?</p> <p>40) Apa penyebab utama banyaknya tumpukan sampah di Rembang?</p>
			Merumuskan isu-isu strategis	<p>41) bagaimana cara mengelola sampah yang baik?</p> <p>42) apakah kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pengelolaan sampah?</p>

Keterangan :

- 1) *Kepala Sub Bagian Pengelolaan Sampah*
- 2) *Kepala UPT Pengelolaan Sampah*
- 3) *Tenaga Kerja Lapangan*
- 4) *BSI (Bank Sampah Induk)/Aktivis*
- 5) *Masyarakat*

1.8. Argumen Penelitian

Pembuangan sampah yang tidak diurus akan menyebabkan masalah besar. Ini karena pembuangan sampah ke sungai akan mencemari air, menyebabkan saluran air tersumbat, dan banjir, dan pembakaran sampah akan mencemari udara. Selain itu, sampah tersebut juga akan menyebabkan berbagai penyakit. (Sicular, 1989).

Di Kabupaten Rembang, masalah sampah meliputi peningkatan jumlah sampah yang dihasilkan oleh masyarakat, kurangnya tempat untuk membuang sampah, dan sampah menjadi tempat berkembang biak serangga dan tikus, menyebabkan polusi dan pencemaran tanah, air, dan udara, dan menampung kuman yang berbahaya bagi kesehatan.

Untuk itu, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Rembang bisa memberikan fasilitas-fasilitas seperti setiap kawasan diberikan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan disosialisasikan kepada masyarakat.

1.9. Metode Penelitian

1.9.1. Tipe Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *mix methods* (kualitatif-kuantitatif). Penelitian kualitatif bersifat alamiah, sebab digunakan dengan memandang fenomena yang terjadi di lapangan. Analisis data yang dilakukan secara induktif berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan dan kemudian dirumuskan menjadi hipotesis teoritis. Metode penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang hasilnya tidak dapat diperoleh dengan metode statistik atau

perhitungan lainnya. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang pokok bahasan yang sedang diteliti.

Metode kuantitatif yang digunakan adalah Internal Factor Analysis Summary (IFAS) dan External Factor Analysis Summary (EFAS) (Freddy Rangkuti, 2001). Perhitungan IFAS dan EFAS dilakukan dengan pembobotan dan peratingan terhadap masing-masing faktor lingkungan internal dan eksternal yang mengacu hasil jawaban responden. Penghitungan bobot dan rating ini bertujuan mengetahui faktor lingkungan internal dan dapat memberikan dampak positif dan negatif. Dampak positif ini terkait dengan faktor kekuatan, sedangkan dampak negatif menjadi kelemahan.

Dalam penelitian kualitatif deskriptif bertujuan untuk menggambarkan, meringkas, atau menggambarkan berbagai kondisi, situasi, atau fenomena realitas sosial yang menjadi subjek penelitian. Selain itu, bertujuan untuk menemukan jawaban dan solusi atas masalah gejala sosial yang menjadi subjek penelitian. Sedangkan kuantitatif digunakan untuk menentukan jumlah pembobotan dan rating untuk menemukan kuadran Analisis SWOT.

1.9.2. Situs Penelitian

Situs penelitian adalah tempat penelitian dilakukan. Situs penelitian menyediakan informasi yang diperlukan untuk mendapatkan data yang diperlukan (Wiratna Sujarwene 2014:73). Saat melakukan penelitian

kualitatif, penetapan lokasi penelitian adalah langkah yang paling penting. Ini karena dengan menetapkan lokasi penelitian, baik objek maupun tujuan penelitian dapat ditetapkan. Untuk mendapatkan data primer, penelitian dapat dilakukan di area yang telah ditentukan oleh peneliti. Oleh karena itu, peneliti memilih untuk melakukan penelitian ini di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Rembang.

1.9.3. Subjek Penelitian

Informan atau subjek penelitian ialah seseorang atau sekelompok orang yang dimintai keterangan tentang fakta atau pendapat pribadi. Spradly (dalam Faisal, 1990:44) menjelaskan persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang informan untuk mengurangi kesalahan di lapangan:

- 1) Orang yang dianggap memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam tentang subjek yang akan diteliti
- 2) Orang yang dianggap mampu memberikan informasi yang mendalam tentang masalah yang akan diteliti
- 3) Orang yang terlibat langsung dalam kegiatan lembaga yang akan dijadikan pusat penelitian
- 4) Orang yang mengetahui atau terlibat langsung dalam komunitas yang akan diteliti

Sehingga penelitian ini memiliki subjek yang terkait permasalahan dalam strategi dalam mengelola dan menangani sampah. Informan Pihak Internal dalam penelitian ini yakni Kepala Sub Bagian Pengelolaan Sampah, Kepala UPT (Unit

Pelaksana Teknis) Pengelolaan Sampah, Tenaga Kerja Lapangan. Sedangkan dari Pihak Eksternal yakni BSI (Bank Sampah Induk) Kabupaten Rembang.

1.9.4. Jenis Data

Penelitian ini terdiri dari data kualitatif dan kuantitatif, menurut Wiratna Sujarweni (2014: 89-94). Dalam penelitian ini, kami menggunakan data kualitatif, yaitu informasi yang bukan dalam bentuk angka tetapi diperoleh melalui dokumen atau informasi yang ditulis atau lisan di Kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Rembang. Data kuantitatif, di sisi lain, adalah data dalam bentuk angka.

1.9.5. Sumber Data

Data primer biasanya dikumpulkan melalui survei lapangan, yang menggunakan semua data orisinal sebelumnya. Wawancara dilakukan dengan Kepala Sub Koordinator dan Kepala UPT Pengelolaan Sampah dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Rembang untuk mendapatkan data untuk penelitian ini.

Data sekunder biasanya dikumpulkan oleh lembaga pengumpulan data dan didistribusikan kepada masyarakat pengguna data. Dalam penelitian ini, sumber data sekunder yang digunakan adalah artikel dan sumber internet yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengendalian sampah di Kabupaten Rembang.

1.9.6. Teknik Pengumpulan Data

Berikut ini adalah beberapa metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini:

1. Observasi

Dalam penelitian ini, observasi adalah teknik pengumpulan data yang digunakan secara langsung di lapangan untuk mengamati bagaimana Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Rembang mengelola lingkungan dan menangani masalah sampah.

Penelitian ini dilakukan terkait beberapa variabel yaitu meliputi sasaran dan tujuan kebijakan yang direncanakan Dinas Lingkungan Hidup; sumber daya terdiri dari manusia, finansial, sarana dan prasarana; komunikasi antar organisasi baik internal maupun eksternal; dan faktor pendorong dan penghambat dalam menangani permasalahan sampah di kabupaten Rembang.

2. Wawancara

Teknik wawancara yang dilakukan tidak terstruktur dimana wawancara ini tidak menggunakan pertanyaan yang telah ditetapkan sebelumnya, namun sebagai gantinya dengan mengajukan pertanyaan yang terbuka berdasarkan penelitian dan pembicaraan mengalir seperti percakapan alami.

3. Dokumentasi

Penulis menggunakan teknik dokumentasi ini untuk menyampaikan dan mengumpulkan data melalui catatan peristiwa dengan meninjau catatan ilmiah dan buku teori yang relevan. Di Kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Rembang, peneliti melakukan dokumentasi dengan foto dan rekaman wawancara.

1.9.7. Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data kualitatif dilakukan jika data empiris yang dikumpulkan adalah kumpulan kata-kata daripada rangkaian angka dan tidak dapat dikategorikan atau diklasifikasikan dalam struktur klasifikasi. Seperti yang dinyatakan oleh Miles Huberman dan Saldana (2014:20), kegiatan analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan:

1. Reduksi Data, Data mentah dari lapangan adalah data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Oleh karena itu, data yang relevan harus dipilih untuk disajikan dan memberikan jawaban atas pertanyaan. Setelah pemilihan data, data utama yang diperlukan untuk menjawab masalah yang diteliti kemudian disederhanakan.
2. Penyajian Data, data yang dihasilkan dari proses reduksi data kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskripsi untuk tujuan memberikan informasi yang dapat digunakan untuk

memecahkan masalah yang diteliti. Setelah disajikan secara rinci, langkah berikutnya adalah membahas data tersebut.

3. Penarikan Kesimpulan, Setelah data dibahas secara rinci, kesimpulan diambil dari data dan digunakan untuk menyelesaikan masalah.
4. Analisis SWOT, Fokus pada empat elemen pendekatan: kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan ancaman (threats). Untuk mengurangi kelemahan dan ancaman, masing-masing elemen akan dihubungkan satu sama lain. Setelah faktor internal dan eksternal digabungkan, akan lebih mudah untuk membuat strategi yang tepat untuk perusahaan dan mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan.

1.9.8. Kualitas Data

Menurut Moleong (2011:324), teknik pemeriksaan diperlukan untuk menentukan keabsahan data. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan pada sejumlah kriteria. Empat metode penelitian dapat digunakan untuk keabsahan data:

- 1) Kepercayaan (*Credibility*)
 - a. Triangulasi
 - b. Menggunakan Bahan Referensi
 - c. Mengadakan Membercheck
- 2) Keteralihan (*Transferability*)

- 3) Ketergantungan (*Dependability*)
- 4) Kepastian (*Confirmability*)

Penelitian ini akan menggunakan triangulasi data untuk membandingkan dan memverifikasi tingkat kepercayaan informan terhadap Strategi Pengelolaan Sampah di Kabupaten Rembang. Penulis menggunakan jenis triangulasi sumber dalam penelitian ini. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data yang dikumpulkan. Data dianggap valid jika informasi yang diberikan oleh informan konsisten atau sesuai